

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Atamimi. 2006. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- A.S.S Tambunan, 1986. *Pemilu di Indonesia, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*. Bina Cipta. Bandung.
- Abdul Ghoffar. 2009. *Perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara Maju*. Kencana Penada Media Group. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2018. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Edisi Revisi 2008*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Didik Supriyanto dan August Mellaz. 2011. *Ambang Batas Perwakilan*. Kajian Perludem dan Kemitraan. Perludem. Jakarta
- Douglas V. Verney. 1992. *Parliamentary Government and Presidential Government, dalam Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press. Oxford.
- Erfandi. 2014. *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang.
- Gotfridus Goris Seran. 2013. *Kamus Pemilu Populer : Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hanta Yuda AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hendarmin Ranadireksa. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media. Bandung.

I Made Pasek Dii madeantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.

Isharyanto. 2017. *Partai Politik Ideologi dan Kekuasaan*. Absolute Media. Yogyakarta.

Janedjri M Gaffar. 2013. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press. Jakarta.

_____. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Indonesia Merdeka*. Konstitusi Press. Jakarta.

Jasim Hamidi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Alumni. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Kontitusi Press. Jakarta.

_____. 2007. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press. Jakarta.

_____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

_____. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Raja Grafindo. Jakarta.

Kacung Marijan. 2015. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Kencana. Jakarta.

Khairul Fahmi. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Rajawali Pers. . Jakarta.



Luky Sandra Amalia dkk. 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Maria Farida Indrati. 2011. *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Jakarta.

Maswadi Rauf dkk. 2009. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Miriam Budiarmo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Muhadam Labolo & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu secara Demokratis*. Setara Press. Malang.

Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana. Jakarta.

Ni'matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta.

Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*. Rajawali Pers. Jakarta.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers. Jakarta.

_____. 2018 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.

Sarundajang. 2012. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

M. Solly Lubis. 1980. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Alumni. Bandung.

Sri M Soemantri. 1991. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.

Syafiie I. K. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* Prenada Media Group. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Yoyoh Rohaniah dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Intrans Publishing. Malang.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Electoral Treshold dan Parliamentary Treshold pada Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009 pengujian atas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal, Website, Artikel dan lain lain.

Denny Indrayana. *Sistem Presidensial yang Adil dan Demokratis* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada). Yogyakarta, 6 Februari 2012.

Adlina Adelia. 2018. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Treshold) dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*. Tesis. UII. Yogyakarta.

Fadli Ramadhanil. 2013. *Pelaksanaan Proses Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum 2014 di Provinsi Sumatra Barat*. Skripsi. Universitas Andalas. Padang.

Saldi Isra. 2013. *Hubungan Presiden dan DPR*, Jurnal Konstitusi. Volume 10.

Sholahuddin Al-Fatih dkk. *Reformulasi Parliamentary Treshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia*. Artikel. FH Universitas Brawijaya. Malang.

Skripsi Sumitra Abdi Negara. 2018. *Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak*. Skripsi. Universitas Andalas. Padang.

Sunny Ummul Firdaus. 2010. *Relevansi Parliamentary Treshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*. Jurnal Konstitusi. Volume 8.

Wasisto Raharjo Jati. 2013. *Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*. Jurnal Yudisial. Volume 6.

Winda Rahayu Ersy. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Skripsi. Universitas Andalas. Padang.

Yogo Pamungkas. 2014. *Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Rechts Vinding. Volume 3.

Inilah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Diakses melalui [setkab.go.id/inilah-undang-undang nomor 7](http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7) . pada 21 Februari 2019, Pukul 10.42 WIB.

Parliamentary Threshold Lebih Efektif Menjaring Parpol Berkualitas. Diakses melalui <http://www.hukumonline.com> pada 27 Februari 2019, Pukul 13.35 WIB.

Mahkamah Kontitusi tolak gugatan partai garuda soal ambang batas parlemen. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426183359-12-293889/mk-tolak-gugatan-partai-garuda-soal-ambang-batas-parlemen> pada 19 Februari 2019 Pukul 10.25 WIB.

http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_system/ Diakses pada 21 November 2019 Pukul, 10.45 WIB.

<https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/Pages/Kondisi%20Umum%20di%20Slowakia.aspx/> Diakses pada 22 November 2019 pukul 13.30 CET.

Sistem pemerintahan presidensial, parlementer dan campuran. Diakses melalui Pknasyik.wordpress.com/2012/sistem-pemerintahan-presidensial-parlementer-dancampuran/ pada 13 Maret 2020. Pukul 11.30 WIB.

Soal Ambang Batas Parlemen <https://syamsuddinharis.wordpress.com>. Diakses pada 11 April 2020 Pukul 16.30 WIB.

www.perludem.org. Diakses pada 11 April 2020 Pukul 15.30 WIB.

